

Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Vol . 19, No. 1, 2019, hal 118-126

ISSN 1693-7597 (Print), 2623-2650 (online)

Available online: <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan>

Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Tata Kelola Aset Daerah (Study Pada Kantor Badan Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Ikhsan Abdullah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

ihsanabdullah@umsu.ac.id

Edisah Putra Nainggolan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

<https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.4383>

Abstrak : penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi keuangan dan tata kelola keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yakni penelitian yang berupaya untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana suatu variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Kantor BPKAD Provinsi Sumatera Utara bidang akuntansi dan keuangan berjumlah 35 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui penyebaran angket di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Tata kelola Aset Daerah juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

This study aims to analyze the effect of financial accounting systems and financial governance on the quality of regional financial statements. The method used in this research is quantitative descriptive research that seeks to examine and explain how an independent variable affects the dependent variable. The population and sample in this study were 35 employees working in the North Sumatra Province BPKAD Office. Data collection techniques in this study is through the distribution of questionnaires at the study site. Based on the results of the study it can be concluded that the Regional Financial Accounting System variables have a significant influence on the quality of regional financial statements. Regional Asset Governance also has a significant influence on the quality of regional financial reports

Keywords : governance, accounting system, quality of financial statements

Cara Sitasi : Abdullah,I.Dan Nainggolan,E.P. 2019. Kualitas Laporan Keuangan Daerah Ditinjau Dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Tata Kelola Aset Daerah (Study Pada Kantor Badan Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 19(1), 118-126. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.4383>.

PENDAHULUAN

Tata kelola yang baik merupakan kunci dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik. Untuk itu dalam sistem penyelenggaraan keuangan daerah dibutuhkan suatu tata kelola yang transparan dan akuntabel. Hal ini disebabkan adanya sistem sosial kontrol yang sangat ketat dari masyarakat yang turut aktif dalam mengawasi suatu pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang baik yang dituangkan dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah. Namun kualitasnya suatu laporan keuangan pemerintah tidak hanya dapat terwujud hanya dengan sistem akuntansi yang baik dan benar tetapi faktor – faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Maka dari itu, pemahaman aparatur atas penerapan PP No.71 Tahun 2010 memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Dalam prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas, hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Walaupun pemerintah daerah telah membangun sistem akuntansi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 Tahun 2013 yang mempunyai peranan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang mana wajib menjadi acuan oleh seluruh pemerintah daerah, tapi tidak menutup kemungkinan terdapat daerah-daerah yang sistem akuntansinya belum optimal sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kajian Pustaka

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Akuntansi merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh manajemen dalam menyiapkan laporan keuangan secara tepat dan akurat, yang bertujuan untuk sebagai bahan laporan kepada investor, pemerintah dan dinas perpajakan di suatu negara. Sistem akuntansi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 menyebutkan bahwa tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebagai alat untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh SAP dan kebijakan akuntansi menjadi serangkaian prosedur pencatatan dengan menggunakan

akuntansi *double entry* melalui alat- alatnya berupa buku jurnal, buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan itu sendiri.

Tata kelola Aset Daerah

Tata kelola aset milik daerah menurut Permendagri 17 Tahun 2007 adalah rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan tuntutan ganti rugi. Tata kelola aset milik daerah merupakan bagian dari tata kelola keuangan daerah. Selain itu, aset milik daerah merupakan salah satu unsure penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tentu saja tata kelola aset milik daerah yang baik akan mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Tentu saja tata kelola aset milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar (Oktavia dan Sumini, 2010).

Laporan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Menurut Gibson dalam Yadiati (2017) laporan keuangan adalah "*financial statements aimed to provide useful information to stakeholder in business and economic decision making*". Laporan keuangan ditujukan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dan sebagai dasar acuan pembuatan keputusan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan dalam PSAP 01 adalah sebagai berikut : laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

HIPOTESIS

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

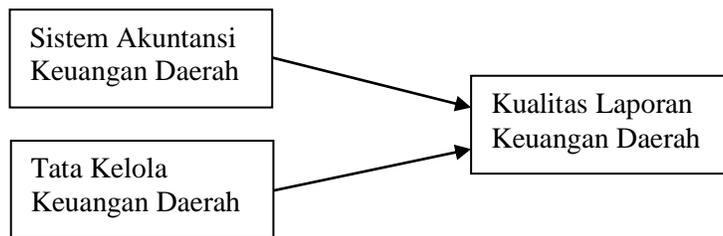
Penelitian yang dilakukan permadi, (2013) mengenai sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kualitas informasi keuangan berbanding lurus dengan kewajaran penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dihasilkan dari adanya suatu sistem akuntansi. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan besarnya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar (92,7%). Semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian teoritis tersebut maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Pengaruh Tata Kelola Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky, (2017) mengenai tata kelola aset daerah menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Lahirnya Pmendagri No. 17 Tahun 2007 diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mengelola barang milik daerahnya dengan baik. Tidak sedikit barang milik daerah yang berpindah tangan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Dikarenakan penyajian barang milik daerah yang tidak didukung dengan rincian daftar aset maupun dokumen berupa daftar inventarisasi dan penilaian aset tersebut. Atau dengan kata lain pengelolaan barang milik daerah yang kurang baik. Kasus tersebut merupakan salah satu kendala untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Padahal pengelolaan barang milik daerah sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan. Hal ini diperkuat dengan adanya Pernyataan Nomor 07 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “aset tetap merupakan suatu bagian aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Berdasarkan uraian teoritis tersebut maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Tata Kelola Keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, dimana teknik dalam menentukan Populasi yang digunakan menggunakan metode *target population* dengan syarat-syarat sebagai berikut: pegawai yang bekerja pada Kantor BPKAD Provinsi Sumatera Utara bidang akuntansi dan keuangan berjumlah 35 orang (berdasarkan hasil wawancara dan surat penelitian). Teknik pengambilan sampel jenuh yaitu dengan menggunakan seluruh populasi penelitian menjadi sampel penelitian. Maka sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai yang bekerja pada Kantor BPKAD Provinsi Sumatera Utara bidang akuntansi dan keuangan berjumlah 35 orang (berdasarkan hasil wawancara dan surat penelitian). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan untuk mengumpulkan data-data, informasi, keterangan-keterangan serta fakta-fakta yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka dilakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner (Angket). Analisis data yang dilakukan yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut :

Uji Normalitas

Berdasarkan pengujian normalitas P-P plot seluruh persamaan terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan cenderung mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data yang dipergunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk diuji dengan model regresi. Selanjutnya berdasarkan pengujian grafik histogram dapat disimpulkan bahwa distribusi data normal karena grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi data normal yang tidak melenceng kanan maupun melenceng kiri. Jadi, berarti data residual berdistribusi normal. Terbukti bahwa data maupun model yang digunakan memenuhi asumsi normalitas.

Uji Heterokedasitas

Berdasarkan hasil pengujian heterokedastisitas terhadap 3 (tiga) persamaan maka dapat terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka berdasarkan metode grafik *scatter plot* tersebut maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Multikolenaritas

Berdasarkan hasil pengujian dapat terlihat bahwa data (variabel) tidak terkena multikolinieritas karena nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,1 sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kualitas Laporan Keuangan Daerah berdasarkan masukan variabel Tata kelola Aset Daerah dan SIAKD.

Hasil uji Hipotesis

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik yang terdiri pengujian normalitas, multikolinieriti, dan pengujian heteroskedastisitas, diperoleh kesimpulan bahwa model sudah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisa regresi berganda, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis

Uji Hipotesis 1

Hipotesis 1 menyatakan Sistem Akuntansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap tata kelola keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis 1 sebagaimana dijelaskan pada tabel 1 menjelaskan bahwa hipotesis 1 diterima dengan tingkat signifikansi $0.004 < 0,05$, disimpulkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Tabel 1 Coeficient

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.663	2.773		2.764	.010
	Sistem Akuntansi	.722	.134	.347	3.397	.004
	Tata Kelola	.625	.091	.303	2.473	.020

a. Dependent Variable: Kualitas LK

Uji Hipotesis 2

Hipotesis 2 menyatakan Tata kelola keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas keuangan Daerah. Hasil pengujian hipotesis 1 sebagaimana dijelaskan pada tabel 1 menjelaskan bahwa hipotesis 1 diterima dengan tingkat signifikansi $0.020 < 0,05$, disimpulkan bahwa variabel Tata kelola Keuangan Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Hasil pengujian hipotesis 1 membuktikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. permadi, (2013) mengenai sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kualitas informasi keuangan berbanding lurus dengan kewajaran penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dihasilkan dari adanya suatu sistem akuntansi. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan besarnya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dalam memberikan kontribusi pengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar (92,7%). Semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Tata Kelola Keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa Tata Kelola Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Penelitian yang dilakukan oleh Rizky, (2017) mengenai tata kelola aset daerah menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Lahirnya Pemendagri No. 17 Tahun 2007 diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mengelola barang milik daerahnya dengan baik. Tidak sedikit barang milik daerah yang berpindah tangan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Dikarenakan penyajian barang milik daerah yang tidak didukung dengan rincian daftar aset maupun dokumen berupa daftar inventarisasi dan penilaian aset tersebut. Atau dengan kata lain pengelolaan barang milik daerah yang kurang baik. Kasus tersebut merupakan salah satu kendala untuk mencapai opini

wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*). Padahal pengelolaan barang milik daerah sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan. Hal ini diperkuat dengan adanya Pernyataan Nomor 07 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “aset tetap merupakan suatu bagian aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jawaban responden diperoleh bahwa Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah masih ditemukan kekurangan yaitu dalam aspek identifikasi prosedur. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian signifikansi parsial (uji-t) diperoleh hasil bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- b. Berdasarkan hasil distribusi jawaban diperoleh bahwa Tata kelola Aset Daerah masih ditemukan kekurangan yaitu dalam aspek kepastian nilai aset. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian signifikansi parsial diperoleh hasil bahwa variabel tata kelola Aset Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penegelolaan aset daerah diharapkan dalam sistem penghapusan Aset/Barang Milik Negara/Daerah harus meminta persetujuan dari DPRD sebelum membuat berita acara.
- b. Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah maka BPKAD harus secara teliti dalam melaksanakan indentifikasi prosedur agar hasil laporan dapat lebih berkualitas.
- c. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memilih alternative variabel lain untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah seperti kualitas dan kemampuan auditor pemerintah, agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Erlina, 2011. *Metodologi Penelitian*. USU Press, Medan.

Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Istijanto,. 2005,*Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PTGramedia Pustaka Utama.

Juliandi, Azuar.2013. “*Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*”. Medan: M2000.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. UII Press Yogyakarta.

- Muller, *et al.* 2016. *IPSAS Explained. Second Edition*. United Kingdom : John Wiley and Sons, Ltd.
- Oktavia Pangaribuan dan Sumini. 2010. Modul: *Pokok-pokok Tata kelola Barang Milik Daerah*.
- Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual*. Penerbit: Salemba Empat.
- Sholeh ,Chabib. dan Romansjah, Heru. 2010. *Tata kelola Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung. Fokusmedia.
- Sugiyono. 2012. “*Metode Penelitian Bisnis*”. Bandung : CV. Alfabeta, Bandung.
- Wilson, *et al.* 2016. *Accounting for Governmental and NonProfit Entities. Fifteenth Edition*. New York : McGraw-Hill Companies.
- Republik Indonesia. 2003.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. 2004. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2005.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Tata kelola Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tata kelola Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Tata kelola Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pelaksanaan Tata kelola Barang Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. PP No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia. 2013.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata kelola Barang Milik Negara/Daerah. Sekretariat Negara RI. Jakarta.

- Ferdianus, 2013. *Analisis penatausahaan aset tetap untuk menghasilkan data yang dipercaya dalam laporan barang milik daerah (studi pada pemerintah provinsi maluku)*. Tesis. Universitas Gajah Mada.
- Hidayati, et al. 2016. *Pengaruh siklus tata kelola barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan *(studi empiris pada pemerintah kabupaten solok selatan)*. Jurnal Akuntansi vol 8, No.1
- Permadi. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Bandung : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Poae, et.al. 2017. *Pengaruh Tata kelola Barang milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Rizqi. 2017. *Pengaruh Tata kelola Aset Daerah (Psap 07 Aset Tetap) Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Badan Tata kelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung*. Universitas Komputer Indonesi
- Sari, Deti Mawar. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Bandung : Program